



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/124/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012.A/SEK/SK/III/2010 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2015;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.Pan/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012.A/SEK/SK/III/2010 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/574/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

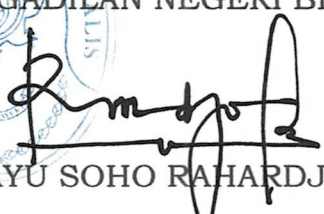
KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 




BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pegawai Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1214 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

TIM PELAKSANAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bayu Soho Rahardjo, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis	Pembina
2.	Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis	Ketua Tim
3.	Aliludin, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis	Koordinator Teknikal
4.	Immanuel Rismawati, S.E.Ak.	Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis	Koordinator Operasional

TIM PELAKSANAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Febriano Hermady, S.H.	Hakim	Koordinator Area I Manajemen Perubahan
2.	Rini Riawati, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota

TIM PELAKSANAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Rita Novita Sari, S.H.	Hakim	Koordinator Area II Penataan Tata Laksana
2.	Nita Herawati, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota

TIM PELAKSANAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Tia Rusmaya, S.H.	Hakim	Koordinator Area III Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya
2.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaian ORTALA	Anggota

TIM PELAKSANAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Ulwan Maluf, S.H.	Hakim	Koordinator Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja
2.	Aminah, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota

TIM PELAKSANAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.M.H.	Hakim	Koordinator Area V Penguatan Pengawasan
2.	Aldi Pangrestu, S.H.	Hakim	Anggota
3.	Teten Yazid Zani, A.Md.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota

TIM PELAKSANAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Belinda Rosa Alexandra, S.H.	Hakim	Koordinator Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
2.	Ignas Ridlo Anarki, S.H.	Hakim	Anggota
3.	Ali Akbar, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7





 BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
BENGKALIS
NOMOR W4.U3/144 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tim Reformasi Birokrasi
Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dan Pandangan Mengenai substansi dan langkah langkah reformasi birokrasi.
2. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan baik dalam kualitas hasil, dan ketepatan waktu.
3. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil yang ditetapkan.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO